

## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal kebijakan dan kerangka hukum, tantangan besar masih tetap ada dalam menangani masalah ini. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan domestik, pemerkosaan, dan pelecehan seksual, terutama selama pandemi COVID-19, yang memperburuk situasi bagi perempuan yang terperangkap dalam lingkaran kekerasan.

Pemerintah Kenya telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah ini, seperti memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat, mendirikan pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan, serta melaksanakan kampanye kesadaran publik. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya sumber daya, kegagalan dalam penegakan hukum yang konsisten, dan adanya budaya patriarki yang sering menghalangi perempuan untuk melapor.

Meskipun ada beberapa kemajuan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan, masih banyak perempuan yang menghadapi stigma, ketakutan, dan kekurangan dukungan untuk keluar dari kekerasan. Selain itu, ada juga tantangan dalam menangani kekerasan berbasis gender di daerah pedesaan, di mana akses terhadap layanan dan penegakan hukum lebih terbatas.

Secara keseluruhan, meskipun upaya besar telah dilakukan, penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kenya masih memerlukan perhatian yang lebih besar untuk memperkuat sistem perlindungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan akses yang lebih baik ke layanan dukungan bagi para korban. Keberhasilan dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk menjaga lingkungan yang sejahtera dan mendukung para perempuan di Kenya.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan kepada UN Women yang akan membantu menangani dalam isu kekerasan pada perempuan di Kenya ini adalah UN Women dapat terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Kenya untuk meningkatkan kapasitas aktor penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Pelatihan lebih lanjut mengenai penanganan kasus dengan sensitifitas gender, serta penyediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan hukum yang ada, akan memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Selain itu, UN Women dapat mendukung pendirian lebih banyak pusat layanan terpadu di daerah-daerah terpencil untuk memberikan bantuan medis, hukum, dan psikologis kepada korban. Selain itu juga dengan meningkatkan kampanye kesadaran yang lebih luas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya perubahan budaya yang mendukung kesetaraan gender. Ini bisa mencakup program pendidikan dan pelatihan untuk laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menantang norma sosial yang mendukung kekerasan berbasis gender. Kampanye ini juga perlu mencakup pendidikan di sekolah-sekolah, komunitas lokal, serta platform digital untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat luas.

Saran bagi peneliti selanjutnya, supaya agar dapat melakukan penelitian terkait peran UN Women dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Dengan banyak perkembangan dan akses yang sudah tidak terbatas seperti di masa Covid-19, diharapkan daya serta sumber – sumber penelitian dapat diperoleh lebih mudah.